
**PERADABAN ISLAM PADA PERIODE KHULAFUR RASYIDIN (632–661 M):
TRANSFORMASI TATA KELOLA, TIPE KEPEMIMPINAN, DAN KONTRIBUSI
TERHADAP PEMBENTUKAN PERADABAN**

Juwita Arleni Kasmah¹, Ratu Ramadhani Harahap², Ressa Desniana³, Suci Sandrina⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan AL Maksum Langkat, Indonesia

Email Coressponden: juwitaarleni@gmail.com

ABSTRAK

Periode Khulafaur Rasyidin (632–661 M) merupakan fase transisi ketika komunitas Muslim membangun kembali otoritas politik setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara mekanisme pergantian kepemimpinan, perkembangan tata kelola pemerintahan, karakter kepemimpinan empat khalifah, dan kontribusinya terhadap pembentukan peradaban Islam. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi kepustakaan. Data primer konseptual diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, dan karya sejarah Islam, sedangkan data sekunder berasal dari buku dan artikel ilmiah Indonesia yang relevan. Analisis dilakukan melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, kemudian dibandingkan lintas-periode kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan berkembang secara adaptif: dari konsolidasi dan sentralisasi pada masa Abu Bakar, institusionalisasi administrasi pada masa Umar, ekspansi dan standardisasi keagamaan pada masa Utsman, hingga reformasi berbasis keadilan di tengah konflik politik pada masa Ali. Perbedaan gaya kepemimpinan bukan menunjukkan inkonsistensi, tetapi memperlihatkan kemampuan menyesuaikan instrumen pemerintahan dengan persoalan yang dihadapi. Kontribusi terbesar periode ini terletak pada konsolidasi politik, penguatan administrasi dan fiskal, standardisasi mushaf, perluasan jaringan wilayah, serta artikulasi nilai keadilan dan amanah. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan Khulafaur Rasyidin sebagai proses transformasi tata kelola, bukan sekadar rangkaian biografi dan prestasi individual, sehingga hubungan antara krisis, pilihan kelembagaan, dan keluaran peradaban dapat terlihat secara lebih utuh.

Kata kunci: Khulafaur Rasyidin; sejarah peradaban Islam; kepemimpinan; tata kelola; syura; kontribusi peradaban.

ABSTRACT

The Rashidun Caliphate period (632–661 CE) was a transitional phase in which the Muslim community reconstructed political authority after the death of Prophet Muhammad. This article analyzes the relationship between succession mechanisms, the development of governance, the leadership characteristics of the four caliphs, and their contributions to Islamic civilization. The study employs a historical method with a qualitative-descriptive and library-research approach. Conceptual primary sources include the Qur'an, hadith, and classical Islamic historical works, while secondary sources consist of Indonesian books and scholarly articles. Data were analyzed through source identification, criticism, interpretation, and historiography, followed by cross-period comparison of Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali. The findings indicate an adaptive transformation of governance: consolidation and centralization under Abu Bakr, administrative institutionalization under Umar, expansion and religious standardization under Uthman, and justice-oriented reform amid political conflict under Ali. Differences in leadership styles should not be read as inconsistency; rather, they demonstrate adaptation of governing instruments to changing problems. The principal contribution of this period was the consolidation of political authority, strengthening of administrative and fiscal institutions, standardization of the Qur'anic codex, territorial expansion, and articulation of justice and trustworthiness. The novelty of this article lies in interpreting the Rashidun period as a process of governance transformation rather than merely a sequence of biographies and achievements, making the relationship between crisis, institutional choice, and civilizational outcomes more visible.

Keywords: Rashidun Caliphate; Islamic civilization; leadership; governance; shura; civilizational contribution.

1. PENDAHULUAN

Wafatnya Nabi Muhammad saw. pada 632 M tidak hanya mengakhiri fase kenabian, tetapi juga membuka persoalan kelembagaan yang belum pernah diuji dalam skala yang sama: bagaimana otoritas komunitas Muslim dipindahkan kepada pemimpin politik tanpa mengubah prinsip dasar agama yang baru saja dibangun. Persoalan tersebut menjadikan periode Khulafaur Rasyidin sebagai laboratorium historis bagi pembentukan tata kelola Islam awal. Dalam makalah sumber, fase ini ditempatkan sebagai periode yang menentukan keberlangsungan umat karena sesudah wafat Nabi muncul kebutuhan untuk menjaga persatuan, mengatur masyarakat, mempertahankan wilayah, dan memastikan ajaran tetap menjadi rujukan kehidupan publik. Kerangka awal tersebut penting, tetapi untuk kepentingan artikel ilmiah perlu dikembangkan dari deskripsi tokoh menuju analisis hubungan antara pilihan kepemimpinan dan perubahan institusional.

Literatur Indonesia tentang Khulafaur Rasyidin memperlihatkan kecenderungan yang cukup konsisten. Zainudin (2020) menempatkan pembahasan pada kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali serta kontribusinya bagi peradaban Muslim. Muharrom (2024) juga memusatkan perhatian pada perkembangan peradaban, sistem kekuasaan, dan capaian masing-masing khalifah. Rahman dan Usman (2020) melihat periode tersebut sebagai bagian dari perkembangan peradaban Islam awal, sedangkan Hindarsyah dan Alpizar (2024) menggabungkan sistem pemerintahan, kebijakan khalifah, dan bibliographic analysis. Pola ini memperlihatkan bahwa pengetahuan tentang periode tersebut telah cukup tersedia, tetapi sebagian besar kajian masih disusun berdasarkan urutan khalifah atau daftar kontribusi.

Pada sisi kepemimpinan, Setiyowati et al. (2021) mengkaji kepemimpinan Islam periode Khulafaur Rasyidin dengan menekankan karakter para khalifah. Zakki et al. (2023) menyoroti dimensi kepemimpinan profetik, sedangkan Wahyudi dan Harris (2025) menghubungkan kepemimpinan profetik dengan kebijakan pertahanan, eksekutif, dan sosial-ekonomi. Kajian terbaru oleh Ustri et al. (2025) memperluas analisis ke politik, ekonomi, hukum Islam, dan pendidikan. Sementara itu, Bangsa dan Hadi (2024) menggeser fokus ke nilai kepemimpinan sebagai landasan pendidikan karakter. Literatur tersebut menguatkan bahwa amanah, keadilan, musyawarah, kepedulian, keberanian, dan tanggung jawab merupakan tema berulang dalam pembacaan terhadap empat khalifah.

Kajian yang lebih baru memperlihatkan perluasan fokus. Sa'adah (2026) membahas kontribusi Khulafaur Rasyidin pada pendidikan, pemerintahan, hukum, budaya, dan kepemimpinan; Mulatsih dan Azizah (2026) menyoroti nilai akhlak dalam tata pemerintahan; sedangkan Amalia et al. (2025) mengkaji transformasi nilai kepemimpinan ke sistem pendidikan kontemporer. Amiruddin et al. (2025) menekankan keadilan, syura, tanggung jawab, kerendahan hati, dan keteladanan. Arah penelitian ini menunjukkan bahwa Khulafaur Rasyidin semakin sering dibaca sebagai sumber nilai kepemimpinan untuk kebutuhan masa kini. Namun, kecenderungan tersebut juga dapat membuat konteks historis masing-masing keputusan kurang mendapatkan perhatian apabila nilai-nilai normatif langsung dipindahkan ke konteks modern.

State of the art penelitian ini karena itu berada pada titik temu antara sejarah politik Islam, kepemimpinan, dan pembentukan institusi. Periode Khulafaur Rasyidin tidak cukup dipahami dengan pertanyaan siapa yang memimpin dan apa prestasinya. Pertanyaan yang lebih produktif ialah bagaimana mekanisme pergantian kepemimpinan berubah, bagaimana perubahan itu memengaruhi desain pemerintahan, dan bagaimana desain tersebut menghasilkan capaian atau konflik tertentu. Dengan sudut pandang demikian, Perang Riddah bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga ujian terhadap otoritas pusat; pembentukan diwan pada masa Umar bukan sekadar inovasi administratif, melainkan respons terhadap perluasan wilayah; standardisasi mushaf pada masa Utsman dapat dibaca sebagai respons terhadap diversifikasi komunitas; dan kebijakan Ali perlu dipahami sebagai upaya reformasi dalam lingkungan politik yang telah mengalami fragmentasi.

Gap analysis penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara sistematis menghubungkan tiga lapisan analisis sekaligus, yaitu mekanisme suksesi, tipe kepemimpinan, dan keluaran kelembagaan/peradaban. Banyak tulisan telah membahas ketiganya, tetapi secara terpisah. Ketika Abu Bakar disebut tegas, Umar administratif, Utsman lembut, dan Ali prinsipil, kategori tersebut sering berhenti sebagai label karakter. Padahal label baru bermakna jika dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dan instrumen yang dipilih. Demikian pula, perluasan wilayah atau pengumpulan mushaf sering diposisikan sebagai prestasi yang berdiri sendiri, bukan sebagai hasil dari kapasitas institusi dan keputusan kepemimpinan.

Novelty artikel ini adalah model pembacaan integratif yang menempatkan empat khalifah sebagai empat tahap adaptasi tata kelola. Tahap pertama adalah konsolidasi otoritas dan integritas komunitas; tahap kedua adalah institusionalisasi administrasi; tahap ketiga adalah standardisasi dan pengelolaan kompleksitas ekspansi; tahap keempat adalah reformasi normatif dalam kondisi fragmentasi politik. Model ini tidak bermaksud menganggap perkembangan tersebut sebagai garis lurus yang selalu maju, sebab masa Utsman dan Ali menunjukkan bahwa ekspansi kelembagaan juga menghasilkan persoalan baru. Dengan demikian, perubahan peradaban dipahami sebagai proses yang memiliki capaian sekaligus biaya politik.

Kajian ini juga penting karena pembacaan terhadap Khulafaur Rasyidin sering terjebak pada dua ekstrem. Ekstrem pertama menjadikannya model ideal tanpa memperhatikan konteks historis dan konflik. Ekstrem kedua memusatkan perhatian pada konflik sehingga mengabaikan kontribusi institusional yang bertahan dalam sejarah Islam. Artikel ini berusaha menjaga keduanya secara proporsional melalui kritik sumber dan perbandingan antarkasus. Prinsip musyawarah, amanah, dan keadilan dipertahankan sebagai tema normatif, tetapi penerapannya ditelaah berdasarkan situasi konkret tiap pemerintahan.

Secara akademik, pendekatan tersebut relevan dengan kebutuhan penelitian sejarah yang tidak hanya mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab, respons, dan konsekuensi. Dalam sumber makalah awal, misalnya, Abu Bakar digambarkan menghadapi Perang Riddah, Umar membangun pembagian wilayah dan diwan, Utsman menstandarkan mushaf, dan Ali melakukan reformasi di tengah Perang Jamal dan Shiffin. Rangkaian ini menyediakan bahan empiris yang kuat untuk membangun narasi transformasi kelembagaan.

Artikel ini mempertahankan data pokok tersebut, tetapi menyusunnya kembali dalam kerangka analitis yang lebih ketat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pembentukan dan perubahan tata pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin, mengidentifikasi karakter kepemimpinan masing-masing khalifah berdasarkan keputusan dan konteks pemerintahannya, serta menjelaskan kontribusi kelembagaan, sosial, keagamaan, dan politik yang membentuk fondasi peradaban Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana mekanisme suksesi dan tata pemerintahan berubah dari Abu Bakar sampai Ali; (2) bagaimana karakter kepemimpinan masing-masing khalifah berkaitan dengan masalah zamannya; dan (3) kontribusi apa yang paling menentukan bagi keberlanjutan peradaban Islam awal?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi kepustakaan. Pilihan metode didasarkan pada karakter objek penelitian yang berupa peristiwa, kebijakan, tokoh, dan perubahan kelembagaan pada periode 632–661 M. Prosedur penelitian disusun agar proses analisis dapat ditelusuri dan direproduksi, bukan sekadar menghasilkan uraian naratif. Sumber dan teknik penelitian disusun berdasarkan prinsip kerja penelitian sejarah yang mencakup identifikasi sumber, kritik, interpretasi, dan penyusunan historiografi.

Sumber data dibagi menjadi sumber primer konseptual dan sumber sekunder. Sumber primer konseptual meliputi Al-Qur'an dan hadis yang digunakan untuk membaca prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah; karya sejarah Islam klasik yang tersedia dalam edisi terjemahan Indonesia digunakan untuk menelusuri peristiwa dan kebijakan. Sumber sekunder terdiri atas buku sejarah peradaban Islam dan artikel jurnal Indonesia yang membahas Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan, pemerintahan, serta pendidikan nilai. Dokumen awal penelitian yang menjadi basis artikel memuat 25 halaman, tiga fokus pembahasan utama, dan daftar pustaka yang kemudian diverifikasi dan diperluas dengan literatur ilmiah Indonesia yang relevan.

Unit analisis penelitian adalah empat periode pemerintahan: Abu Bakar (632–634 M), Umar (634–644 M), Utsman (644–656 M), dan Ali (656–661 M). Tidak digunakan sampel statistik karena objek penelitian berupa keseluruhan kasus kepemimpinan dalam rentang waktu yang ditentukan. Data dikodekan ke dalam lima kategori analisis: mekanisme suksesi, struktur pemerintahan, kebijakan utama, karakter kepemimpinan, serta keluaran dan konflik. Setiap kategori dibandingkan lintas-khalifah untuk menemukan kesinambungan, perubahan, dan titik balik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi teks. Tahap pertama adalah inventarisasi sumber berdasarkan kata kunci Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, syura, pemerintahan, kepemimpinan, mushaf, Baitul Mal, diwan, dan konflik politik. Tahap kedua adalah seleksi sumber berdasarkan relevansi langsung terhadap pertanyaan penelitian. Tahap ketiga adalah pencatatan informasi ke dalam matriks analisis berisi tokoh/peristiwa, waktu, kebijakan, tujuan, dampak, dan sumber. Tahap keempat adalah

triangulasi dengan membandingkan sekurang-kurangnya dua sumber untuk klaim historis yang penting.

Kritik sumber dilakukan secara internal dan eksternal. Kritik eksternal diarahkan pada identitas karya, tahun terbit, asal penerbitan, dan status artikel atau buku. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan isi sumber, terutama ketika suatu peristiwa memiliki penafsiran berbeda. Klaim yang tidak memperoleh dukungan memadai tidak dijadikan dasar generalisasi. Untuk menjaga objektivitas, narasi yang bersifat populer atau kisah keteladanan dipisahkan dari fakta historis yang lebih kuat. Dengan prosedur ini, contoh seperti kepedulian Umar terhadap rakyat digunakan sebagai ilustrasi nilai kepemimpinan, bukan sebagai satu-satunya bukti untuk menyimpulkan keseluruhan sistem pemerintahan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi kronologis dan analisis tematik. Reduksi kronologis menyusun data sesuai urutan pemerintahan, sedangkan analisis tematik mengelompokkan data berdasarkan suksesi, administrasi, fiskal, hukum, agama, militer, dan kepemimpinan. Setelah itu dilakukan analisis komparatif untuk melihat apakah perubahan kebijakan berkaitan dengan perubahan kondisi politik dan sosial. Hasil analisis kemudian ditulis dalam bentuk historiografi analitis. Metode ini sejalan dengan karakter penelitian kepustakaan yang digunakan dalam kajian Khulafaur Rasyidin sebelumnya, antara lain Zakki et al. (2023) dan Hindarsyah dan Alpizar (2024).

Keabsahan interpretasi dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi kronologi. Penelitian tidak melakukan wawancara, survei, eksperimen, atau pengukuran kuantitatif sehingga tidak memerlukan ukuran sampel, volume eksperimen, atau replikasi laboratorium. Replikasi penelitian dilakukan pada tingkat prosedural: peneliti lain dapat menggunakan periode, kategori kode, kata kunci, dan matriks analisis yang sama untuk memeriksa kembali kesimpulan. Keterbatasan utama metode adalah ketergantungan pada sumber tertulis dan kemungkinan perbedaan tradisi historiografis, sehingga kesimpulan dibatasi pada pola yang didukung oleh sumber yang dibandingkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peta Perubahan Tata Kelola 632–661 M

Hasil analisis menunjukkan bahwa periode 632–661 M tidak dapat dipahami sebagai satu bentuk pemerintahan yang statis. Mekanisme pergantian pemimpin berbeda dari satu khalifah ke khalifah berikutnya. Abu Bakar muncul melalui proses musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah yang kemudian diikuti baiat umum; Umar memperoleh legitimasi melalui penunjukan Abu Bakar setelah konsultasi dengan para sahabat dan baiat; Utsman dipilih melalui dewan syura yang dibentuk Umar; sedangkan Ali menerima baiat dalam situasi krisis setelah wafatnya Utsman. Variasi ini menunjukkan bahwa prinsip legitimasi dipertahankan, tetapi prosedur kelembagaannya adaptif terhadap keadaan. Temuan ini mendukung gambaran Zainudin (2020) dan Muharrom (2024) bahwa pembentukan kekhalifahan awal berlangsung melalui pola yang tidak seragam.

Perubahan mekanisme suksesi tersebut berhubungan dengan perkembangan kompleksitas pemerintahan. Pada masa Abu Bakar, kebutuhan paling mendesak adalah mempertahankan

otoritas pusat dan integritas komunitas. Karena itu, pemerintahan cenderung sederhana dan terpusat. Pada masa Umar, wilayah dan penduduk yang dikelola meningkat sehingga diperlukan provinsi, gubernur, diwan, Baitul Mal yang lebih sistematis, dan pengadilan. Pada masa Utsman, struktur tersebut diteruskan dalam wilayah yang lebih luas, sementara standardisasi mushaf merespons perbedaan bacaan yang muncul seiring penyebaran komunitas. Pada masa Ali, persoalan utama bergeser menjadi legitimasi dan konflik internal sehingga kapasitas administrasi berhadapan dengan fragmentasi politik.

Tabel 1 merangkum pola tersebut. Tabel tidak dimaksudkan sebagai pengukuran kuantitatif, melainkan sebagai sintesis analitis agar perubahan antarkhalifah dapat dilihat secara serentak.

Khalifah	Mekanisme legitimasi	Orientasi pemerintahan	Ciri kepemimpinan	Kontribusi dominan
Abu Bakar	Musyawarah–baiat	Konsolidasi dan sentralisasi	Tegas, amanah, deliberatif	Stabilitas umat; pengumpulan Al-Qur'an
Umar	Penunjukan setelah konsultasi–baiat	Institusionalisasi administrasi	Adil, disiplin, visioner	Diwan, provinsi, peradilan, Baitul Mal
Utsman	Dewan syura–baiat	Ekspansi dan standardisasi	Lembut, persuasif, delegatif	Mushaf standar; penguatan maritim
Ali	Baiat dalam krisis	Reformasi dan pemulihan keadilan	Prinsipil, tegas, reformis	Reformasi pejabat dan distribusi; keteladanan hukum

3.2. Abu Bakar: Konsolidasi Otoritas dan Pertahanan Integritas Komunitas

Hasil kajian terhadap masa Abu Bakar memperlihatkan bahwa masalah pemerintahan yang paling menentukan bukan ekspansi institusi, melainkan keberlangsungan otoritas. Setelah Nabi wafat, sebagian kelompok melakukan pembangkangan, termasuk penolakan kewajiban zakat. Keputusan Abu Bakar untuk menghadapi Perang Riddah menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah tidak diletakkan hanya pada hubungan personal dengan Nabi, tetapi pada kesinambungan kewajiban komunitas. Dalam makalah sumber, keputusan tersebut digambarkan sebagai bentuk ketegasan untuk menjaga persatuan. Secara analitis, kebijakan itu dapat dibaca sebagai proses konsolidasi pusat: pemerintah menetapkan batas terhadap fragmentasi kewajiban publik.

Struktur pemerintahan Abu Bakar relatif sederhana. Khalifah memegang kendali langsung dengan dukungan sahabat sebagai penasihat, sementara mekanisme musyawarah menjadi instrumen pengambilan keputusan. Pola ini sesuai dengan temuan Zainudin (2020) yang menyebut karakter pemerintahan Abu Bakar bersifat sentral, dengan fungsi pemerintahan terpusat pada khalifah. Sentralisasi tersebut tidak otomatis berarti otoritarianisme, sebab otoritas tetap dibatasi oleh rujukan agama dan konsultasi dengan tokoh masyarakat. Dengan demikian, terdapat kombinasi antara pusat keputusan yang kuat dan legitimasi deliberatif.

Kontribusi penting lainnya ialah pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf setelah gugurnya sejumlah penghafal. Di sini terlihat hubungan antara krisis dan inovasi kelembagaan. Ancaman kehilangan transmisi lisan mendorong keputusan dokumentasi. Kebijakan tersebut kemudian menjadi fondasi bagi proses standardisasi pada masa Utsman. Dengan kata lain, satu kebijakan tidak berdiri sendiri; ia menciptakan prasyarat bagi kebijakan berikutnya. Dalam perspektif transformasi peradaban, kontribusi Abu Bakar terletak pada menjaga agar komunitas tidak runtuh sebelum institusi yang lebih kompleks dibangun.

Gaya kepemimpinan Abu Bakar dapat dirumuskan sebagai kombinasi musyawarah dan ketegasan situasional. Label “demokratis” yang terdapat dalam makalah awal perlu dibaca hati-hati agar tidak memaksakan istilah politik modern. Yang dapat ditunjukkan oleh sumber ialah adanya konsultasi, baiat, dan perhatian pada penerimaan umat, bersamaan dengan keberanian mengambil keputusan ketika terdapat ancaman terhadap integritas komunitas. Pola ini sejalan dengan kajian kepemimpinan profetik yang menempatkan keberanian, kepedulian terhadap umat, dan amanah sebagai karakter utama (Zakki et al., 2023).

Dengan demikian, masa Abu Bakar menghasilkan dua keluaran strategis: konsolidasi politik dan preservasi sumber keagamaan. Keduanya saling terkait. Tanpa konsolidasi, proyek dokumentasi Al-Qur'an sulit memperoleh dukungan terpusat; tanpa preservasi sumber, konsolidasi politik tidak memiliki fondasi simbolik dan normatif yang kuat. Hasil ini memperlihatkan bahwa kontribusi seorang khalifah sebaiknya tidak hanya dihitung berdasarkan banyaknya institusi yang dibentuk, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mempertahankan prasyarat keberlanjutan peradaban.

3.3. Umar: Institusionalisasi Pemerintahan dan Ekspansi Kapasitas Negara

Masa Umar menunjukkan perubahan paling jelas dari pemerintahan yang relatif sederhana menuju pemerintahan yang terstruktur. Perluasan wilayah membuat hubungan antara pusat dan daerah semakin kompleks. Pemerintahan merespons dengan pembagian wilayah, pengangkatan gubernur, pembentukan diwan, pengelolaan Baitul Mal, dan penguatan peradilan. Temuan ini konsisten dengan Nasution (2021), serta penelitian Zainudin (2020), yang menempatkan Umar sebagai tokoh penting dalam pembentukan administrasi pemerintahan Islam awal.

Diwan memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa pemerintahan tidak lagi hanya bergantung pada hubungan personal khalifah dengan masyarakat. Pencatatan dan pengelolaan administrasi memungkinkan sumber daya, tunjangan, dan urusan pemerintahan ditangani secara lebih teratur. Perubahan ini merupakan bentuk institusionalisasi: fungsi yang sebelumnya melekat pada pemimpin mulai dikerjakan melalui perangkat administrasi. Dalam konteks sejarah politik, kapasitas seperti ini menjadi syarat untuk mengelola wilayah yang jauh dari pusat.

Penguatan peradilan juga menunjukkan diferensiasi fungsi pemerintahan. Pengangkatan qadhi di daerah menciptakan jalur penyelesaian perkara yang lebih jelas. Walaupun sistem tersebut belum dapat disamakan begitu saja dengan negara modern, prinsip pembagian tugas menunjukkan respons terhadap peningkatan skala masyarakat. Rahman dan Usman (2020) serta Hindarsyah dan Alpizar (2024) sama-sama menempatkan perkembangan administrasi dan pemerintahan sebagai salah satu ciri penting periode ini.

Karakter kepemimpinan Umar tampak dalam kombinasi ketegasan, pengawasan, dan orientasi kesejahteraan. Kisah patroli malam dan kepeduliannya terhadap keluarga yang mengalami kelaparan sering digunakan dalam literatur sebagai contoh kedekatan pemimpin dengan rakyat. Dalam artikel ini, kisah tersebut tidak dipakai sebagai data tunggal, tetapi sebagai ilustrasi yang memperkuat pola umum: kekuasaan administratif dipertautkan dengan pertanggungjawaban moral. Bangsa dan Hadi (2024) juga menemukan bahwa nilai tanggung jawab, keadilan, keberanian, dan kejujuran merupakan unsur yang sering ditarik dari keteladanan Khulafaur Rasyidin.

Perluasan wilayah ke Syam, Persia, dan Mesir meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus beban administrasi. Karena itu, keberhasilan Umar tidak hanya dapat diukur dari luas wilayah, tetapi dari kemampuannya membangun mekanisme yang mengelola konsekuensi ekspansi. Temuan ini penting untuk gap analysis penelitian: ekspansi dan institusionalisasi bukan dua cerita terpisah. Ekspansi menghasilkan kebutuhan administratif; kebutuhan administratif mendorong pembentukan lembaga; lembaga kemudian memungkinkan pengelolaan ekspansi yang lebih stabil.

Pada titik ini, tipe kepemimpinan Umar lebih tepat dipahami sebagai kepemimpinan administratif-moral. Ia kuat dalam membuat aturan dan mengawasi pejabat, tetapi orientasinya tidak semata-mata pada kontrol. Prinsip keadilan menjadi dasar legitimasi. Mulatsih dan Azizah (2026) mengidentifikasi keadilan, amanah, syura, zuhud, dan tawadhu sebagai nilai utama dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Temuan tersebut membantu menjelaskan mengapa struktur yang semakin kuat tetap dibaca sebagai bagian dari kepemimpinan etis, bukan hanya birokrasi.

3.4. Utsman: Ekspansi, Standardisasi Mushaf, dan Kompleksitas Legitimasi

Masa Utsman memperlihatkan bahwa institusi yang sudah dibangun dapat menghasilkan manfaat sekaligus persoalan baru. Wilayah Islam semakin luas, pemasukan meningkat, dan administrasi meneruskan struktur sebelumnya. Namun, kompleksitas politik juga meningkat. Sumber makalah mengaitkan ketegangan dengan kebijakan pengangkatan pejabat dari kalangan keluarga. Dalam pembacaan artikel ini, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas administratif tidak selalu identik dengan penerimaan politik. Pemerintahan dapat bekerja secara struktural, tetapi legitimasi sosial tetap memerlukan persepsi keadilan dan representasi.

Kontribusi paling kuat Utsman berada pada standardisasi mushaf Al-Qur'an. Ketika komunitas Muslim tersebar ke berbagai wilayah, perbedaan bacaan yang dipersepsikan sebagai potensi konflik mendorong penyusunan mushaf standar. Muharrom (2024) dan Zainudin (2020) menempatkan kebijakan ini sebagai salah satu capaian utama Utsman. Kebijakan tersebut memperlihatkan pola yang sama dengan masa Abu Bakar: perkembangan politik dan geografis menghasilkan persoalan transmisi keagamaan, lalu pemerintah merespons melalui standardisasi.

Utsman juga mengembangkan kekuatan maritim. Dalam sumber makalah disebutkan bahwa ia membentuk angkatan laut pertama dalam Islam. Penguatan tersebut terkait dengan kebutuhan mempertahankan dan memperluas wilayah yang telah berkembang. Dari sudut tata kelola, ini menunjukkan pergeseran kebutuhan pertahanan: pemerintahan yang sebelumnya banyak

beroperasi pada wilayah daratan mulai menghadapi ruang maritim. Dengan demikian, inovasi militer juga dapat dipahami sebagai adaptasi geografis.

Karakter kepemimpinan Utsman digambarkan lembut, dermawan, persuasif, dan delegatif. Keunggulannya ialah kemampuan memberi kepercayaan dan menggunakan pendekatan damai. Namun, pada saat konflik politik meningkat, kelembutan dan delegasi menghadapi keterbatasan. Kajian Wahyudi dan Harris (2025) menegaskan bahwa kepemimpinan profetik pada periode ini dapat dilihat melalui komunikasi dan kebijakan sosial-ekonomi, tetapi karakter setiap khalifah tetap berbeda. Perbedaan tersebut menjadi penting karena efektivitas suatu gaya kepemimpinan bergantung pada konteks.

Ketegangan pada akhir pemerintahan Utsman menunjukkan bahwa keberhasilan peradaban tidak selalu linear. Pembangunan wilayah, peningkatan pendapatan, dan standardisasi agama dapat berjalan bersamaan dengan meningkatnya kompetisi politik. Inilah salah satu temuan penting penelitian: kompleksitas institusi dapat meningkatkan kapasitas negara sekaligus memperbesar jumlah titik konflik. Karena itu, standardisasi dan ekspansi harus dibaca bersama dengan persoalan distribusi jabatan dan persepsi legitimasi.

Utsman akhirnya terbunuh pada 656 M, dan krisis tersebut menjadi titik balik menuju masa Ali. Dari perspektif perubahan tata kelola, peristiwa itu menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan memerlukan bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga kepercayaan politik. Dalam kajian kontemporer, Ustri et al. (2025) mengingatkan bahwa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin harus dibaca lintas bidang politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Temuan artikel ini menambahkan bahwa lintas bidang tersebut perlu dihubungkan melalui persoalan legitimasi.

3.5. Ali: Reformasi Keadilan di Tengah Fragmentasi Politik

Ali menerima kepemimpinan dalam kondisi yang berbeda dari tiga pendahulunya. Wafatnya Utsman meninggalkan konflik politik yang belum selesai, sementara dukungan terhadap Ali tidak seragam. Karena itu, agenda pemerintahan Ali bukan lagi membangun sistem dari awal, tetapi memulihkan legitimasi dan mengoreksi praktik yang dianggap bermasalah. Sumber makalah menyebut pergantian pejabat, pengelolaan Baitul Mal secara lebih merata, dan penegakan hukum tanpa membedakan status sebagai bagian dari upaya reformasi.

Reformasi tersebut memperlihatkan kepemimpinan yang prinsipil. Ali tidak hanya mempertahankan struktur yang diwarisi, tetapi melakukan perubahan pada bagian yang dianggap tidak sesuai dengan keadilan. Namun, pilihan reformasi berlangsung ketika pemerintah menghadapi Perang Jamal, Perang Shiffin, dan munculnya Khawarij. Akibatnya, kapasitas reformasi berhadapan langsung dengan fragmentasi politik. Dalam konteks ini, kegagalan mencapai stabilitas penuh tidak dapat dibaca semata sebagai kegagalan pribadi pemimpin; terdapat kondisi struktural berupa persaingan legitimasi dan polarisasi kelompok.

Kepindahan pusat pemerintahan ke Kufah memperlihatkan bahwa pusat kekuasaan juga merupakan instrumen strategis. Pemindahan tersebut menyesuaikan kebutuhan politik dan militer masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola tidak hanya terdiri dari lembaga, tetapi juga keputusan geografis mengenai lokasi pusat pemerintahan. Pilihan tersebut

membantu menjelaskan mengapa pemerintahan Ali perlu dipahami sebagai pemerintahan dalam kondisi krisis, bukan sebagai kelanjutan administratif yang tenang.

Karakter kepemimpinan Ali sering digambarkan adil, tegas, berilmu, dan berpegang pada prinsip. Temuan tersebut sejalan dengan kajian kepemimpinan kontemporer yang melihat Khulafaur Rasyidin sebagai sumber nilai keadilan dan tanggung jawab (Amiruddin et al., 2025; Elvira dan Wulandzari, 2025). Akan tetapi, artikel ini menekankan dimensi kontekstual: ketegasan Ali adalah respons terhadap kebutuhan reformasi, sementara prinsip keadilan diuji oleh konflik yang membuat setiap keputusan memiliki konsekuensi politik.

Dengan demikian, kontribusi Ali bukan terutama ekspansi, melainkan artikulasi normatif tentang pemerintahan yang adil dalam keadaan sulit. Ini merupakan bentuk kontribusi peradaban yang berbeda dari pembangunan institusi pada masa Umar atau standarisasi mushaf pada masa Utsman. Ali memperlihatkan bahwa legitimasi pemerintahan dapat dibangun melalui konsistensi prinsip, meskipun konsistensi tersebut tidak selalu menghasilkan stabilitas politik jangka pendek.

Akhir masa Ali pada 661 M menutup periode Khulafaur Rasyidin dan membuka fase politik berikutnya. Secara historis, transisi ini memperlihatkan bahwa model kepemimpinan berbasis baiat, musyawarah, dan kedekatan pemimpin dengan komunitas telah menghadapi tantangan besar ketika wilayah dan kepentingan politik berkembang. Namun, nilai-nilai yang terartikulasikan selama periode tersebut terus menjadi bahan pemikiran politik dan etika Islam.

3.6. Perbandingan Tipe Kepemimpinan: Dari Label Tokoh ke Respons Kontekstual

Perbandingan empat khalifah menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan tidak seharusnya diperlakukan sebagai sifat personal yang terpisah dari kondisi. Abu Bakar menjadi tegas ketika integritas komunitas terancam; Umar membangun administrasi ketika skala pemerintahan membesar; Utsman mengandalkan kelembutan dan delegasi ketika jaringan kekuasaan berkembang; Ali menekankan prinsip dan reformasi ketika legitimasi mengalami fragmentasi. Dengan demikian, kategori tegas, administratif, persuasif, dan prinsipil merupakan ringkasan, bukan penjelasan final.

Jika keempatnya dibandingkan berdasarkan instrumen pemerintahan, terdapat kesinambungan pada tiga nilai: amanah, keadilan, dan musyawarah. Perbedaannya terdapat pada prioritas. Abu Bakar menempatkan integritas dan stabilitas sebagai prioritas; Umar menempatkan kapasitas institusi; Utsman menempatkan kesinambungan ekspansi dan standarisasi; Ali menempatkan koreksi keadilan. Kajian Zakki et al. (2023) memperlihatkan nilai kepedulian, keberanian, dan visi masa depan sebagai unsur kepemimpinan profetik, sedangkan Mulatsih dan Azizah (2026) menambahkan zuhud dan tawadhu. Artikel ini menyatukan temuan tersebut ke dalam hubungan antara nilai dan instrumen.

Pola tersebut dapat digambarkan sebagai matriks respons. Krisis integritas menghasilkan konsolidasi; ekspansi menghasilkan birokratisasi; diversifikasi komunitas menghasilkan standarisasi; konflik legitimasi menghasilkan reformasi. Hubungan ini bukan hukum kausal yang mutlak, tetapi pola interpretatif yang didukung oleh perbandingan empat kasus. Kekuatan analisisnya terletak pada kemampuan menjelaskan mengapa kebijakan yang berbeda muncul dalam satu periode sejarah yang sama.

Pendekatan ini juga mencegah romantisasi. Khulafaur Rasyidin memang menjadi sumber keteladanan, tetapi setiap kebijakan memiliki konteks dan keterbatasan. Pemerintahan Umar yang lebih terstruktur menghasilkan kapasitas besar, tetapi ekspansi juga meningkatkan beban pengelolaan. Standardisasi Utsman menghasilkan keseragaman mushaf, tetapi masa pemerintahannya mengalami konflik politik. Reformasi Ali menegaskan keadilan, tetapi berlangsung dalam situasi perang. Peradaban berkembang melalui keberhasilan yang bersamaan dengan tantangan.

3.7. Kontribusi terhadap Pembentukan Peradaban Islam

Kontribusi Abu Bakar paling mendasar adalah menjaga keberlangsungan komunitas pada masa transisi. Perang Riddah mempertahankan otoritas pusat, sedangkan pengumpulan Al-Qur'an menyediakan langkah awal preservasi teks. Dalam kerangka peradaban, stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan institusi. Karena itu, kontribusi Abu Bakar lebih tepat disebut sebagai fondasi konsolidasi.

Umar memberikan kontribusi paling menonjol dalam institusionalisasi. Pembagian wilayah, pengangkatan gubernur, diwan, pengelolaan Baitul Mal, dan peradilan membentuk perangkat pemerintahan yang lebih mampu mengelola wilayah luas. Literatur Indonesia berulang kali menempatkan aspek ini sebagai capaian utama Umar (Nasution, 2021; Zainudin, 2020; Hindarsyah & Alpizar, 2024). Artikel ini memperluasnya dengan menunjukkan bahwa institusionalisasi merupakan respons terhadap skala pemerintahan, bukan sekadar preferensi administratif pribadi.

Utsman berkontribusi pada integrasi keagamaan dan pertahanan. Standardisasi mushaf menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseragaman rujukan tertulis, sementara penguatan maritim menambah kemampuan pertahanan. Muharrom (2024) menekankan kedua aspek tersebut bersama pembangunan infrastruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi peradaban mencakup simbolik-keagamaan dan material-institusional secara bersamaan.

Ali memberi kontribusi dalam artikulasi keadilan dan reformasi pemerintahan. Dalam kondisi konflik, ia berusaha mengembalikan distribusi dan jabatan pada prinsip yang dianggap adil. Walaupun konflik membatasi capaian praktis, periode ini menghasilkan warisan pemikiran tentang hubungan antara kekuasaan, hukum, dan keadilan. Kajian Sa'adah (2026) memperlihatkan bahwa warisan tersebut dapat ditelusuri ke bidang hukum, pemerintahan, pendidikan, dan budaya.

Secara keseluruhan, empat khalifah membentuk rantai kontribusi yang saling melengkapi: konsolidasi, institusionalisasi, standardisasi-ekspansi, dan reformasi-keadilan. Rantai ini tidak bersifat linear sempurna karena setiap tahap juga menghasilkan persoalan baru. Namun, pola tersebut menjelaskan mengapa periode 632–661 M memiliki posisi sentral dalam sejarah peradaban Islam. Ia membangun prasyarat politik, administratif, keagamaan, dan etika bagi perkembangan periode berikutnya.

Temuan tersebut juga memperkuat penelitian pendidikan karakter. Bangsa dan Hadi (2024) menunjukkan bahwa nilai kejujuran, keadilan, kedermawanan, keberanian, kesabaran, dan tanggung jawab dapat diambil sebagai bahan pendidikan. Akan tetapi, artikel ini menekankan

bahwa pengajaran nilai akan lebih bermakna jika disertai konteks keputusan. Misalnya, ketegasan Abu Bakar dipahami bersama ancaman disintegrasi, sedangkan keadilan Ali dipahami bersama konflik. Dengan cara itu, sejarah tidak berubah menjadi daftar sifat tokoh, melainkan pembelajaran tentang penalaran etis dalam kondisi nyata.

Arah tersebut juga sejalan dengan kajian Amalia et al. (2025) yang membahas transformasi nilai kepemimpinan ke sistem pendidikan kontemporer. Nilai tidak harus dipindahkan secara mekanis. Yang dapat ditransformasikan ialah prinsip pengambilan keputusan: musyawarah, pertanggungjawaban, keberpihakan pada keadilan, kepedulian terhadap masyarakat, dan keberanian menghadapi masalah. Proses transformasi seperti ini lebih sesuai dengan temuan historis karena mempertahankan konteks sekaligus membuka ruang penerapan.

Dari sisi penelitian, hasil ini memperlihatkan bahwa studi Khulafaur Rasyidin memiliki ruang pengembangan yang luas. Penelitian lanjutan dapat menguji secara lebih rinci hubungan antara administrasi fiskal dan ekspansi, membandingkan praktik peradilan antardaerah, atau mengkaji persepsi kelompok masyarakat terhadap legitimasi tiap khalifah. Penelitian digital-humanities juga dapat memetakan jaringan tokoh dan lokasi pemerintahan untuk memperlihatkan struktur kekuasaan secara spasial. Dengan demikian, kajian sejarah Khulafaur Rasyidin tidak berhenti pada narasi klasik, tetapi dapat berkembang menjadi analisis institusi dan jaringan.

Tabel 2 menyajikan sintesis kontribusi berdasarkan dimensi peradaban.

Khalifah	Politik	Administrasi/Ekonomi	Keagamaan	Warisan utama
Abu Bakar	Konsolidasi otoritas	Penguatan pusat	Pengumpulan mushaf	Keberlangsungan komunitas
Umar	Ekspansi terkelola	Diwan, provinsi, Baitul Mal, qadhi	Penguatan tata sosial	Kapasitas institusi
Utsman	Integrasi wilayah	Administrasi dan pertahanan maritim	Standardisasi mushaf	Integrasi komunitas luas
Ali	Reformasi legitimasi	Redistribusi dan koreksi pejabat	Peneguhan prinsip keadilan	Warisan etika pemerintahan

3.8. Sintesis State of the Art, Gap, dan Novelty

State of the art literatur Indonesia memperlihatkan tiga arus utama. Pertama, kajian deskriptif-historis yang memetakan pemerintahan dan kontribusi empat khalifah (Zainudin, 2020; Muharrom, 2024; Rahman & Usman, 2020). Kedua, kajian kepemimpinan yang menekankan nilai profetik, moral, dan karakter (Setiyowati et al., 2021; Zakki et al., 2023; Wahyudi & Harris, 2025). Ketiga, kajian relevansi kontemporer yang membawa nilai Khulafaur Rasyidin ke pendidikan, karakter, dan tata kelola modern (Bangsa & Hadi, 2024; Amalia et al., 2025; Sa'adah, 2026; Mulatsih & Azizah, 2026). Ketiga arus tersebut memperkaya pemahaman, tetapi cenderung memiliki fokus yang berbeda.

Gap yang ditemukan ialah kurangnya integrasi antara mekanisme suksesi, perubahan struktur pemerintahan, karakter kepemimpinan, dan keluaran peradaban dalam satu alur analisis komparatif. Akibatnya, perubahan dari Abu Bakar ke Umar, Utsman, dan Ali mudah terlihat

sebagai pergantian tokoh, padahal terdapat transformasi persoalan dan instrumen pemerintahan. Artikel ini mengisi gap tersebut dengan menjadikan konteks masalah sebagai variabel interpretatif yang menghubungkan gaya kepemimpinan dan kebijakan.

Novelty yang ditawarkan bukan penemuan fakta sejarah baru, melainkan kebaruan kerangka analisis. Periode ini dipetakan sebagai empat respons tata kelola: konsolidasi, institusionalisasi, standardisasi-ekspansi, dan reformasi-keadilan. Kerangka tersebut memungkinkan fakta yang telah dikenal ditempatkan dalam hubungan yang lebih menjelaskan. Dengan demikian, artikel memberi kontribusi konseptual pada cara membaca sejarah peradaban Islam: capaian peradaban muncul melalui interaksi nilai normatif, kapasitas institusi, dan tekanan konteks.

Dari sudut aplikasi, kerangka tersebut dapat digunakan dalam pembelajaran Sejarah Peradaban Islam. Materi dapat disusun bukan hanya berdasarkan biografi, tetapi berdasarkan masalah-kebijakan-dampak. Peserta didik dapat diminta membandingkan mengapa Abu Bakar memilih konsolidasi, mengapa Umar membangun administrasi, mengapa Utsman melakukan standardisasi, dan mengapa Ali menekankan reformasi. Model ini mendukung literasi sejarah karena mengajarkan hubungan sebab-akibat, evaluasi sumber, dan penalaran kontekstual.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa periode Khulafaur Rasyidin (632–661 M) merupakan proses transformasi tata kelola yang berlangsung melalui empat respons kepemimpinan terhadap persoalan yang berbeda. Abu Bakar berperan terutama dalam konsolidasi otoritas dan menjaga keberlangsungan komunitas melalui ketegasan menghadapi pembangkangan serta langkah awal pengumpulan Al-Qur'an. Umar mengubah pemerintahan menjadi lebih terinstitusionalisasi melalui pembagian wilayah, administrasi, peradilan, dan pengelolaan keuangan. Utsman melanjutkan struktur tersebut dalam konteks ekspansi yang lebih luas, sekaligus memberikan kontribusi penting melalui standardisasi mushaf dan penguatan pertahanan maritim, meskipun pemerintahannya menghadapi persoalan legitimasi politik. Ali menjalankan reformasi berbasis keadilan dalam kondisi konflik internal yang membatasi stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, tipe kepemimpinan empat khalifah tidak tepat dipahami hanya sebagai label personal, tetapi sebagai respons kontekstual yang menghubungkan nilai amanah, keadilan, dan musyawarah dengan kebutuhan pemerintahan. Implikasi penelitian ini ialah pembelajaran sejarah Khulafaur Rasyidin dapat diarahkan pada analisis masalah, kebijakan, dan konsekuensi sehingga nilai kepemimpinan tidak dilepaskan dari konteks historisnya. Kerangka konsolidasi–institusionalisasi–standardisasi/ekspansi–reformasi dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang membandingkan lebih rinci aspek fiskal, hukum, jaringan politik, atau penerimaan masyarakat pada tiap periode.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, D. (2022). Metodologi penelitian sejarah Islam. Ombak.

- Afdhal, Z., Fadilah, N., Nahuda, N. R. W., Nurliana, D., Khaeruddin, S. A. M., Solong, N. P., Nurjaman, A., Zaenurrosyid, A., Nudin, B., & Ulya, M. (2023). Sejarah Peradaban Islam. Global Eksekutif Teknologi.
- Al-Ayyubi, I. I., Fauziah, Z., Arifah, H., Hartati, R. D., & Herdiansyah, R. (2024). Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Islam. *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 5(1).
- Amalia, R., Sa'diyah, E. K., Suhadak, M., Arroihan, M. A. F., Muna, N., Putri, M. Z., & Nadzihroh, Y. A. (2025). Transformasi nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam sistem pendidikan era kontemporer. *Tsaqofah dan Tarikh*, 10(2).
- Amiruddin, M., Ganggo, D., Afiidah, N., Maulana, M. D., & Adityapurwoko, F. (2025). Pattern leadership Khulafaur Rasyidin: Analysis history and values for modern life. *Journal of Humanities Research Sustainability*, 2(3), 112–122.
- Bangsa, K. K., & Hadi, A. (2024). Analisis nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai landasan pendidikan karakter di SD/MI. *Abuya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 64–79. <https://doi.org/10.52185/abuyaVol2iss2Y2024579>
- Dwi Susanti. (2026). The Effect of Inflation and the Open Unemployment Rate on the Number of Poor People In North Sumatra. *Zeniusi Journal*, 3(1), 80–91. <https://doi.org/10.70821/zj.v3i1.71>
- Elvira, C., & Wulandzari, A. (2025). Karakteristik kepemimpinan Khulafa'ur Rasyidin dan relevansinya terhadap kepemimpinan kontemporer. *Jurnal IHSAN*, 3(3).
- Hindarsyah, E. W., & Alpizar. (2024). Peradaban Islam pada masa Khulafaurreasyidin. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3). <https://doi.org/10.23969/jp.v9i3.15751>
- Harahap, R. A., & Harahap, H. U. (2024). Sejarah peradaban Islam. Tri Selaras Cendekia.
- Hitti, P. K. (2021). History of the Arabs. Serambi Ilmu Semesta.
- Ibn Khaldun. (2020). Muqaddimah. Pustaka Firdaus.
- Kamali, M. H. (2021). Shari'ah law: An introduction. Oneworld Publications.
- Kennedy, H. (2021). The Prophet and the age of the caliphates. Routledge.
- Lewis, B. (2020). The Arabs in history. Oxford University Press.
- Madjid, N. (2021). Islam doktrin dan peradaban. Paramadina.
- Mulatsih, L. S., & Azizah, I. N. (2026). Sistem pemerintahan pada masa Khulafaurreasyidin: Nilai-nilai akhlak kepemimpinan dan relevansinya bagi kehidupan modern. *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 24(15), 63–71.
- Muharrom, M. F. (2024). Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 9(1), 103–116. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i1.376>
- Nasution, H. (2021). Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. UI Press.

- Nugroho, N. A. K., & Hamdani, M. K. (2021). Internalisasi nilai-nilai kepemimpinan profetik pada masa Khulafaur Rasyidin. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 5(2), 139–149.
- Olifiansyah, M., Hidayat, W., Diaying, B. P., & Dzulfikar, M. (2020). Kepemimpinan dalam perspektif Islam. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 14(1), 98–111.
- Rahman, T., & Usman, M. (2020). Peradaban Islam pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. *Jurnal Studi Islam Pancawahana*, 15(2), 111–126.
- Sa'adah, K. (2026). Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan kontribusinya terhadap pembentukan peradaban Islam: Tinjauan pendidikan, pemerintahan dan budaya Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(7), 726–731.
- Saepullah, S. (2020). Islam dan sistem pemerintahan dalam lintasan sejarah. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 10(2), 23–42.
- Setiyowati, A., Putri, C. J., Jannah, F. M., & As'ad, M. R. (2021). Kepemimpinan Islam periode Khulafaur Rasyidin. *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 1(2), 262–274. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i2.132>
- Shahzadi Hina Sain, & Haris Suwondo. (2026). Teacher Strategies in Improving Students' Reading Literacy Skills through Interactive Digital Mediaat the Elementary Madrasah. *Zeniusi Journal*, 3(1), 10-20. <https://doi.org/10.70821/zj.v3i1.92>
- Wahyudi, M. F., & Harris, T. (2025). Kepemimpinan profetik pada masa Khulafaurasyidin. *Akademika*, 19(2). <https://doi.org/10.30736/adk.v19i2.1693>